

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi adalah sebuah usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang diukur melalui tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita (Irawan dan Suparmoko, 2002). Sedangkan menurut Todaro (2003), pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses multidimensi yang melibatkan perubahan- perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan pemberantasan kemiskinan absolut. Oleh karenanya, pembangunan ekonomi tidak dapat diukur semata-mata dari tingkat pertumbuhan pendapatan atau pendapatan per-kapita, namun harus pula melihat bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan kepada penduduk dan mengetahui siapa yang mendapat manfaat dari pembangunan tersebut.

Pembangunan ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian. Salah satu diantaranya adalah tingkat pengangguran. Melalui tingkat pengangguran kita dapat melihat tingkat kesejahteraan masyarakat serta tingkat distribusi pendapatan. Pengangguran terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang disebabkan karena rendahnya pertumbuhan penciptaan lapangan kerja.

Dalam melakukan pembangunan ekonomi, tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan nasional yang ada saat ini. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan Tujuan Nasional.

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Sementara salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat pengangguran.

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, serta memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah, ini membuat Indonesia pantas disebut sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam maupun sumber daya manusiannya. Hal ini seharusnya dapat memberikan keuntungan untuk perekonomian di Indonesia. Namun faktanya, banyak warga Indonesia yang tidak memiliki pekerjaan atau dengan kata lain menjadi pengangguran.

Secara ekonomi makro, pengangguran menjadi permasalahan pokok baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Alghofari (2010) mengatakan bahwa pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya, hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk

menampung tenaga kerja yang siap bekerja. Atau dengan kata lain, di dalam pasar tenaga kerja jumlah penawaran akan tenaga kerja yang ada lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah permintaan tenaga kerja.

Masalah pengangguran ini merupakan masalah yang selalu menjadi persoalan bangsa Indonesia yang sulit untuk dipecahkan. Hal ini mengingat jumlah kepadatan penduduk Indonesia yang terus bertambah dan tidak diiringi dengan tingginya permintaan akan tenaga kerja dan kurangnya jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Pengangguran sendiri dalam hal ini adalah tingkat pengangguran terbuka diartikan adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Menurut BPS, penganggur terbuka, terdiri dari: mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Berikut merupakan tabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia dari tahun 2010 sampai tahun 2014.

Tabel 1. 1 Tingkat Pengangguran Indonesia tahun 2010 - 2014 (%)

| Tingkat | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pengangguran | 7,14 | 6,56 | 6,13 | 6,17 | 5,94 |

Sumber: BPS, 2016

Masalah pengangguran juga dialami oleh seluruh Provinsi yang di Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat terdiri dari 27 kabupaten/kota, meliputi 18 Kabupaten dan 9 Kota, Sedangkan jumlah kecamatan 626, daerah perkotaan 2.671 dan 3.291 perdesaan. Secara geografis, Provinsi Jawa

Barat terletak di antara 5° 50'-7° 50' Lintang Selatan dan 104° 48'-108° 48' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayahnya: sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta; sebelah Timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah; sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudra Indonesia; dan sebelah Barat, berbatasan dengan Provinsi Banten.

Provinsi Jawa Barat memerankan peran penting dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Sehingga kontribusi Jawa Barat dalam penyerapan tenaga kerja sangat besar. Hal ini mengingat bahwa sebagian besar lokasi industri yang ada di Indonesia berlokasi di Jawa Barat antara lain di Bekasi, Karawang, Purwakarta, Depok, wilayah Bandung dan Subang. Berikut ini adalah kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2014.

Tabel 1. 2 Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 - 2014

| Uraian | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Angkatan Kerja | 20.150.094 | 20.620.610 | 21.006.139 |
| Bekerja | 18.321.108 | 18.731.943 | 19.230.943 |
| Jumlah Pengangguran | 1.828.986 | 1.888.667 | 1.775.196 |
| Bukan Angkatan Kerja | 11.444.047 | 12.825.427 | 12.459.207 |
| Tingkat Pengangguran | 9,08 | 9,16 | 8,45 |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | 63,78 | 62,82 | 62,77 |

Sumber: Jawa Barat dalam angka 2015

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa kondisi pengangguran di Jawa Barat selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuatif. Pada tahun 2013, jumlah pengangguran Jawa Barat mengalami peningkatan menjadi 18.731.943 orang dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 1.828.986 orang. Sementara pada tahun 2014, jumlah pengangguran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 1.775.196 orang.

Jika diperhatikan, meskipun pada tahun 2013 mengalami peningkatan jumlah pengangguran dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2014 jumlah pengangguran di Jawa Barat mengalami penurunan yang cukup besar, dibandingkan dengan peningkatan jumlah pengangguran pada tahun 2013. Hal ini tentunya tidak terlepas dari membaiknya kondisi perekonomian global, khususnya negara-negara tujuan ekspor, dan perekonomian Indonesia pada tahun 2014. Jumlah pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebanyak 1.888.667 orang, dan pengangguran terendah terjadi pada tahun 2014 sebanyak 1.775.196 orang.

Permasalahan pengangguran tidak hanya dialami oleh Provinsi Jawa Barat, namun dialami juga oleh seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, tidak terkecuali masalah pengangguran yang terjadi di Kabupaten Subang. Kabupaten Subang secara geografis terletak di bagian utara Provinsi Jawa Barat dengan batas koordinat yaitu antara 107⁰3'– 107⁰54' Bujur Timur dan 6⁰11' – 6⁰49' Lintang Selatan. Kabupaten Subang memiliki 30 kecamatan yang terdiri 245 desa, dan 8 kelurahan. Pada tata kelola yang lebih kecil lagi, wilayah administrative Kabupaten Subang terdiri dari 1.763 RW dan 6.018 RT.

Subang merupakan salah daerah besar dan berkembang yang cukup banyak industri dan cukup banyak menyerap banyak tenaga kerja. Akan tetapi dalam kenyataannya tingkat pengangguran yang terjadi di Kabupaten Subang masih relatif tinggi.

Sektor ketenagakerjaan sendiri merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan khususnya dalam upaya pemerintah Kabupaten Subang untuk

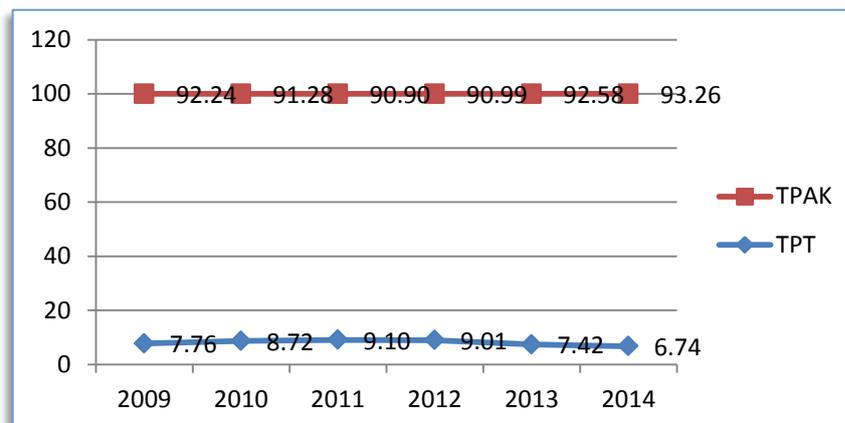
mengurangi jumlah penduduk miskin. Hal ini mengingat bahwa ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia, karena berkaitan erat dengan sosial ekonomi. Disisi lain, pertumbuhan penduduk selalu terkait dengan masalah ketenagakerjaan dan lapangan kerja. Dengan penambahan penduduk usia kerja akan meningkatkan angkatan kerja, tetapi apabila yang terjadi penambahan penduduk bukan usia kerja akan meningkatkan beban tanggungan angkatan kerja.

Meningkatnya angkatan kerja sebaiknya di imbangi dengan kesempatan kerja. Hanya saja kesempatan kerja formal yang tersedia sangat terbatas, sehingga peranan sektor informal memberikan peluang yang baik dalam menciptakan lapangan kerja yang mandiri. Sektor informal yang bercirikan pekerja dengan pendidikan rendah, jam kerja tak teratur dan pendapatan yang rendah memerlukan pemecahan diantaranya melalui program-program yang dapat meningkatkan keterampilan dan produktifitas sehingga mampu meningkatkan kemampuan dalam berusaha.

Ada tiga unsur yang sering terkait dengan masalah kesempatan kerja di Kabupaten Subang, yaitu pertama, golongan umur penduduk yang akan menuntut kesempatan kerja pada saat sekarang dan waktu yang akan datang; kedua, laju peningkatan golongan umur tertentu dalam penambahan angkatan kerja di masa yang akan datang; ketiga, pengaruh perkembangan ekonomi yang mampu menyerap angkatan kerja lebih banyak.

Berdasarkan grafik di bawah memperlihatkan secara faktual fenomena aktivitas perekonomian Kabupaten Subang dalam menyerap pasar kerja

mengalami fluktuatif, dimana angka tertinggi dicapai di tahun 2012 yang mencapai 67,57 % namun pada tahun 2013 menurun menjadi 63,26 %. Adapun dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) memperlihatkan pola yang sedikit berbeda, di mana puncak pengangguran dalam kurun waktu 2009 – 2014 terjadi pada tahun 2011 yang mencapai 9,1 % termasuk mereka yang sedang mencari pekerjaan secara aktif. Hal ini disebabkan selain kesempatan kerja yang relatif rendah juga disebabkan bahwa komposisi penduduk di usia 15 - 64 pada tahun 2011 mencapai 66.54%. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa pada saat kesempatan kerja rendah sementara permintaan terhadap pasar kerja meningkat, maka cenderung pengangguran akan meningkat.



Sumber : BPS Kab.Subang, 2015

Grafik 1. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Subang Tahun 2009-2014

Jika dibandingkan dengan jumlah pengangguran terbuka di seluruh Kota/Kabupaten di Jawa Barat, jumlah pengangguran di Kabupaten Subang berada pada posisi 14 pada tahun 2012, sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 berada pada posisi 15.

Berikut ini adalah jumlah pengangguran di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Barat dari tahun 2012 hingga tahun 2014.

Tabel 1. 3 Jumlah Pengangguran Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2014

| Posisi | Kabupaten/Kota | 2012 | Posisi | Kabupaten/Kota | 2013 | Posisi | Kabupaten/Kota | 2014 |
|---------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 1 | Kab. Bogor | 198,949 | 1 | Kab. Bogor | 182,128 | 1 | Kab. Bogor | 177,222 |
| 2 | Kab. Bandung | 173,575 | 2 | Kab. Bandung | 158,494 | 2 | Kab. Cianjur | 153,407 |
| 3 | Kab. Cirebon | 145,634 | 3 | Kab. Cianjur | 145,532 | 3 | Kab. Bandung | 138,045 |
| 4 | Kab. Karawang | 116,365 | 4 | Kab. Cirebon | 133,553 | 4 | Kab. Cirebon | 121,695 |
| 5 | Kab. Cianjur | 114,146 | 5 | Kota Bandung | 130,052 | 5 | Kota Bekasi | 115,643 |
| 6 | Kota Bandung | 107,384 | 6 | Kota Bekasi | 111,702 | 6 | Kab. Karawang | 114,004 |
| 7 | Kab. Sukabumi | 103,443 | 7 | Kab. Sukabumi | 109,416 | 7 | Kota Bandung | 95,971 |
| 8 | Kota Bekasi | 93,676 | 8 | Kab. Bekasi | 97,922 | 8 | Kab. Bekasi | 94,436 |
| 9 | Kab. Bekasi | 93,375 | 9 | Kab. Karawang | 96,586 | 9 | Kab. Sukabumi | 88,421 |
| 10 | Kota Depok | 78,089 | 10 | Kab. Subang | 81,722 | 10 | Kota Depok | 80,903 |
| 11 | Kab. Bandung Barat | 65,557 | 11 | Kab. Indramayu | 76,501 | 11 | Kab. Subang | 78,818 |
| 12 | Kab. Subang | 63,813 | 12 | Kota Depok | 69,702 | 12 | Kab. Indramayu | 61,403 |
| 13 | Kab. Indramayu | 61,549 | 13 | Kab. Bandung Barat | 63,266 | 13 | Kab. Tasikmalaya | 58,588 |
| 14 | Kab. Subang | 60,347 | 14 | Kab. Tasikmalaya | 53,820 | 14 | Kab. Bandung Barat | 51,971 |
| 15 | Kab. Tasikmalaya | 41,774 | 15 | Kab. Subang | 52,004 | 15 | Kab. Subang | 49,193 |
| 16 | Kab. Ciamis | 41,766 | 16 | Kab. Ciamis | 44,938 | 16 | Kota Bogor | 43,503 |
| 17 | Kab. Majalengka | 40,057 | 17 | Kota Bogor | 43,856 | 17 | Kab. Sumedang | 41,883 |
| 18 | Kota Bogor | 39,417 | 18 | Kab. Majalengka | 43,631 | 18 | Kab. Ciamis | 37,755 |
| 19 | Kab. Sumedang | 39,106 | 19 | Kab. Kuningan | 39,814 | 19 | Kab. Kuningan | 32,118 |
| 20 | Kab. Purwakarta | 38,354 | 20 | Kab. Purwakarta | 37,598 | 20 | Kab. Purwakarta | 31,905 |
| 21 | Kab. Kuningan | 34,608 | 21 | Kab. Sumedang | 33,138 | 21 | Kab. Majalengka | 28,116 |
| 22 | Kota Cimahi | 21,149 | 22 | Kota Cimahi | 29,856 | 22 | Kota Cimahi | 26,006 |
| 23 | Kota Tasikmalaya | 20,749 | 23 | Kota Tasikmalaya | 20,174 | 23 | Kota Cirebon | 16,221 |
| 24 | Kota Cirebon | 16,656 | 24 | Kota Sukabumi | 14,888 | 24 | Kota Sukabumi | 16,083 |
| 25 | Kota Sukabumi | 14,381 | 25 | Kota Cirebon | 12,811 | 25 | Kota Tasikmalaya | 15,571 |
| 26 | Kota Banjar | 5,067 | 26 | Kota Banjar | 5,563 | 26 | Kota Banjar | 6,315 |
| 27 | Kab. Pangandaran | - | 27 | Kab. Pangandaran | - | 27 | Kab. Pangandaran | - |
| Jumlah | | 1,828,986 | Jumlah | | 1,888,667 | Jumlah | | 1,775,196 |

Sumber : Jawa Barat Dalam Angka 2013, 2014, 2015 (diolah)

Berdasarkan data diatas, meskipun saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sedang melakukan peningkatan pembangunan dan keberadaan industri di Kabupaten Subang sudah mulai ramai, namun efek dari pembangunan dan

keberadaan industri tersebut masih belum terasa terhadap penyerapan pengangguran di Kabupaten Subang.

Dengan demikian, dari data diatas permasalahan yang muncul adalah masalah pengangguran yang merupakan suatu masalah serius bagi Kabupaten Subang dan harus menjadi perhatian semua stakeholder, mengingat dampak paling buruk yang akan terjadi adalah dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Di mana efek berantai dari kondisi tersebut adalah munculnya ketidakmampuan rumah tangga (masyarakat) untuk menyekolahkan anak-anaknya. Yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kemiskinan.

Menurut para ahli, perkembangan tingkat pengangguran dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Brata (2002) tentang pembangunan dan kinerja ekonomi regional di Indonesia menunjukkan bahwa adanya hubungan dua arah antara pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi regional di Indonesia, termasuk di masa krisis. Menurutnya pembangunan manusia yang berkualitas mendukung pembangunan ekonomi dan sebaliknya kinerja ekonomi yang baik mendukung pembangunan manusia. Dalam penelitiannya, pembangunan manusia disini adalah kualitas sumber daya manusia yang indikatornya meliputi tingkat pendidikan perempuan dalam mengelola pengeluaran rumah tangga, dan tingkat pendapatan.

Todaro dan Smith (2006) menyatakan bahwa selama bertahun-tahun, penelitian bidang ekonomi menitikberatkan penelitiannya dibidang pendidikan, dan melihat keterkaitan antara pendidikan dengan produktifitas kerja serta output yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan karena titikberat persoalan perekonomian

adalah tingkat pertumbuhan output total yang dihasilkan oleh suatu negara. Selanjutnya Todaro dalam buku yang sama juga menyatakan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang sangat mendasar. Pendidikan memegang peranan kunci dalam membangun ekonomi dan memajukan sebuah bangsa, membantu menyerap teknologi, menciptakan pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan.

Menurut Djamarah (2004) tujuan pendidikan itu menciptakan integritas atau kesempurnaan pribadi. Integritas menyangkut jasmaniah, intelektual, emosional, dan etis. Teori pertumbuhan endogen suatu teori yang menjelaskan akan pentingnya pendidikan/human capital terhadap tingkat pendapatan perkapita maupun pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau negara (Romer, 1994).

Penelitian yang dilakukan oleh Edy (2009) menganalisis pengaruh pendidikan sumber daya manusia terhadap pengangguran di provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa tingkat pendidikan, dan indeks pembangunan manusia mempengaruhi pengangguran karena seseorang yang memiliki pendidikan tinggi akan cenderung mencari pekerjaan pada daerah propinsi baru, karena hal ini lebih leluasa bersaing di daerah atau propinsi lain yang memiliki leading sektor usaha sesuai dengan pendidikan yang dimilikinya.

Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh berbagai peneliti. Berdasarkan penelitian Anggun Kembar Sari (2011), menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik di Sumatera Barat. Penelitian yang dilakukan Novlin Sirait dan AAIN Marhaeni

(2011), menyatakan hal yang sama bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap pengangguran.

Dengan demikian pendidikan memang diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas (Daryono. dkk. 2003) dalam (Edy, 2004). Apabila tidak mencerminkan kualitas yang baik maka sektor ini juga akan menyumbangkan proses terjadinya pengangguran (Edy, 2004).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan, pendidikan sendiri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepirtual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Menurut BPS, pendidikan dibagi menjadi dua macam yaitu pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SM/MA/ sederajat dan PT. Sedangkan pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak

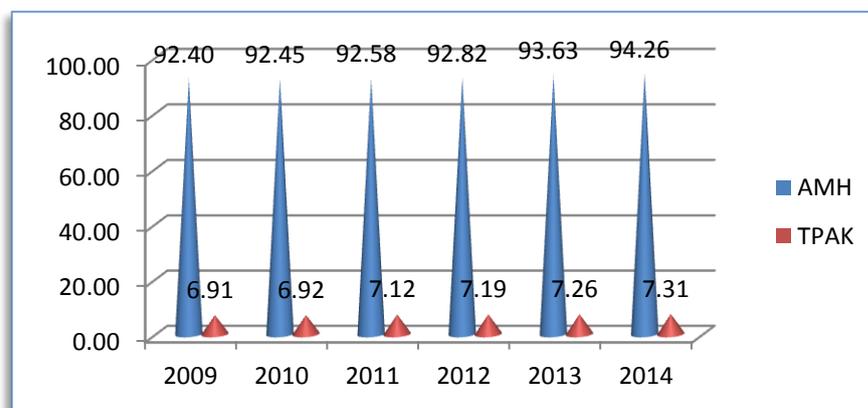
usia dini (PAUD) atau pra-sekolah, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Kemampuan membaca dan menulis merupakan kemampuan minimum yang harus dimiliki penduduk, karena banyak informasi yang membutuhkan kemampuan tersebut, dengan harapan dapat berkembang dalam berbagai aspek kehidupan sehingga kemampuan membaca dan menulis ini menjadi dasar bagi setiap penduduk.

Angka Melek Huruf (AMH) sebagai salah satu variabel dari indeks pendidikan, dihitung dari persentase penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan huruf latin dan atau huruf lainnya. Pengertian melek huruf adalah banyaknya/persentase penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis huruf latin.

Pada kenyataannya masih banyak penduduk usia 15 tahun ke atas atau lebih yang tidak mampu membaca dan menulis. Hal ini dapat disebabkan karena memang sejak lahir sampai sekarang penduduk tersebut belum atau tidak pernah sekolah, atau pernah sekolah tetapi putus sekolah sebelum mampu membaca dan menulis. Kedua kondisi diatas besar kemungkinan disebabkan oleh ketidakmampuan orang tua secara ekonomi untuk menyekolahkan anaknya, ataupun karena kurangnya kesadaran orang tua akan arti pentingnya pendidikan.

Sedangkan rata-rata lama sekolah adalah lama pendidikan penduduk Subang yang berusia 15 tahun ke atas. Angka tersebut memberikan gambaran tentang seberapa lama penduduk Kabupaten Subang dalam mengenyam pendidikan. Sehingga semakin lama penduduk memperoleh pendidikan, maka semakin tinggi pula kualitas SDM penduduk tersebut dan lebih jauh lagi penduduk tersebut akan lebih memiliki peluang untuk memperoleh hidup yang lebih layak.



Sumber : BPS Kab.Subang, 2015

Grafik 1. 2 Angka Melek Huruf dan Rata-rata lama sekolah Kabupaten Subang Tahun 2009-2014

Tingkat melek huruf di Kabupaten Subang pada tahun 2009 tercatat 92,4 % dan tahun 2014 meningkat menjadi 94,26%. Dari kenaikan tersebut nampaknya bahwa peningkatannya belum signifikan dari kurun waktu 6 tahun terakhir, hal itu disebabkan antara lain : 1) penghitungan AMH di mulai dari usia 10 tahun ke atas, sehingga intervensi di bawah usia itu tidak langsung bisa dihitung sebagai capaian AMH tahun berikutnya, 2) tingginya Penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak / belum pernah sekolah, tidak tamat SD pada tahun 2011 sebesar 300,930 (24,46%) dan tahun 2012 mencapai 25,8 %, 3) usia Buta Huruf di dominasi oleh penduduk

yang berusia 45 tahun ke atas. Sehingga perlu ada gerakan buta huruf yang massive.

Adapun untuk rata-rata lama sekolah pada tahun 2009 tercatat 6,91 tahun dan tahun 2013 mencapai 7,26 tahun. Ini berarti bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Subang mengalami kecenderungan naik tetapi belum signifikan dan masih jauh dari harapan untuk mencapai tahap Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun (dalam pengertian RRLS masih di bawah 9 tahun). Kenaikan yang tidak signifikan tersebut antara lain dikarenakan : a) Penghitungan RRLS di mulai dari usia 10 tahun ke atas, sehingga intervensi di bawah usia itu tidak langsung bisa dihitung sebagai capaian IPM tahun berikutnya, b) budaya agraris kurang merangsang tumbuhnya minat melanjutkan sekolah karena pekerjaan petani tidak membutuhkan kualifikasi pendidikan yang tinggi. Sehingga perlu ada gerakan “Akselerasi Percepatan Rrls” yang massive, c) tingginya Penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak / belum pernah sekolah, tidak tamat SD pada tahun 2011 sebesar 300,930 (24,46%) dan tahun 2012 mencapai 25,8 %.

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat pengangguran yaitu jumlah penduduk. Penduduk sendiri diartikan adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap (BPS).

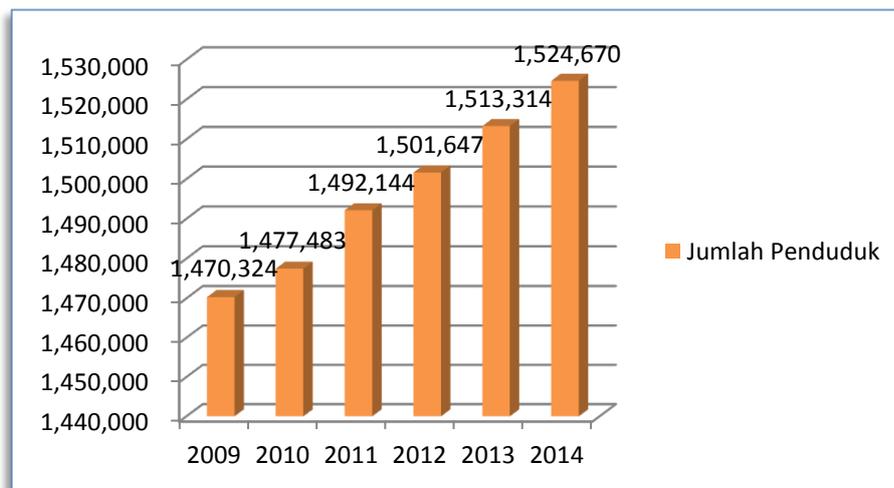
Malthus berpendapat tentang hubungan antara populasi, upah riil, dan inflasi. Ketika populasi buruh tumbuh lebih cepat dari pada produksi makanan, maka upah riil turun, karena pertumbuhan penduduk menyebabkan biaya hidup

yaitu biaya makanan naik. Ketika upah riil di suatu wilayah tinggi, maka akan mempengaruhi pengangguran. Ketika terjadi peningkatan upah riil maka suatu perusahaan akan mengurangi jumlah buruhnya, sementara penawaran tenaga kerja yang ada masih tetap tinggi. Ketika penawaran tenaga kerja lebih tinggi dari pada permintaan tenaga kerja maka akan terjadi pengangguran. Artinya Malthus beranggapan bahwa terdapat pengaruh positif antara pengangguran dengan jumlah penduduk. (Lindiarta, 2014). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Riswandi (2011), menghasilkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pengangguran di Sumatera Barat.

Dengan demikian, penduduk tidak saja berperan sebagai obyek pembangunan, tetapi lebih jauh lagi harus berperan sebagai subyek pembangunan. Sebagai obyek pembangunan, penduduk akan berfungsi sebagai sasaran yang akan dijadikan target pembangunan, sedangkan sebagai subyek pembangunan, sumber daya penduduk akan berfungsi sebagai pemikir, perencana, dan pelaksana berbagai program pembangunan yang hasilnya diharapkan mampu meningkatkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan.

Menyadari akan keberadaan penduduk, disalah satu sisi penduduk bisa menjadi potensi manakala SDM dari penduduk tersebut memiliki kualitas tetapi sebaliknya penduduk bisa menjadi masalah tersendiri manakala kurang memiliki kualitas. Adapun karakteristik SDM yang berkualitas adalah diantaranya sehat, memiliki kecerdasan Intelegensi (IQ), memiliki etika, moralitas dan emosi yang baik (EQ), berakhlak mulia (SQ) serta kemampuan bersosialisasi (Sc Q).

Subang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk yang tidak terlalu padat, dimana penduduk Kabupaten Subang pada tahun 2009 sebanyak 1.470.324 jiwa, dan pada tahun 2014 sebanyak 1.524.670 jiwa. Berikut ini adalah jumlah penduduk Kabupaten Subang tahun 2009-2014.



Sumber : BPS Kab.Subang, 2015

Grafik 1. 3 Jumlah Penduduk Kabupaten Subang Tahun 2009-2014

Dengan laju pertumbuhan penduduk yang demikian dapat diindikasikan bahwa Kabupaten Subang terbukti mampu melaksanakan program-program kependudukan terutama pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang secara faktual selama beberapa terakhir.

Dengan terus bertambahnya jumlah populasi penduduk di Kabupaten Subang dari tahun ke tahun disatu sisi memang memberikan dampak positif yaitu tersedianya banyak tenaga kerja yang tersedia. Namun disisi lain karena banyaknya jumlah tenaga kerja tidak sebesar jumlah kesempatan kerja yang tersedia maka banyak penduduk Indonesia yang menjadi pengangguran. Laju

pertumbuhan penduduk yang sangat cepat akan menyebabkan terjadinya kelebihan tenaga kerja dan apabila tanpa diikuti dengan perluasan kesempatan kerja dapat menimbulkan masalah pengangguran.

Selain pendidikan dan jumlah penduduk, faktor lain yang mempengaruhi tingkat pengangguran adalah pertumbuhan ekonomi. Menurut Murni (2006), pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi terjadinya perkembangan GNP potensial yang mencerminkan adanya pertumbuhan output perkapita dan meningkatnya standar hidup masyarakat. Menurut Sukirno (2008), pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu Negara.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Perekonomian di suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik (Amir, 2008).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang

dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun (Tambunan, 2001). Selain dari sisi permintaan (konsumsi), dari sisi penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan).

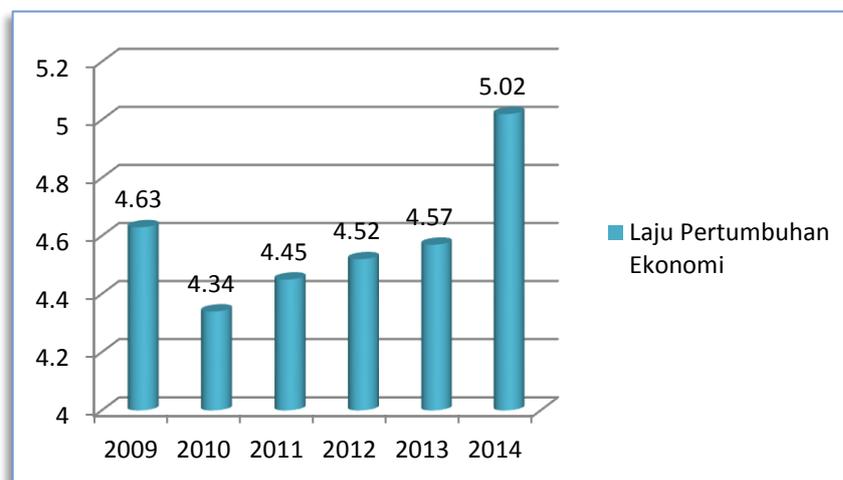
Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. Pemenuhan kebutuhan konsumsi dan kesempatan kerja itu sendiri hanya bisa dicapai dengan peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau PDB yang terus-menerus. Dalam pemahaman ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDB, yang berarti peningkatan Pendapatan Nasional.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan tingkat pengangguran. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat pengangguran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Isti Qomariyah (2012), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terhadap tingkat pengangguran di Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan Hukum Okun, dimana Hukum Okun (Okun's Law) yang menguji hubungan antara tingkat pengangguran dengan besarnya GDP suatu Negara. Setiap adanya peningkatan terhadap presentase pengangguran dalam suatu Negara maka hal

tersebut akan setara dengan terjadinya penurunan besarnya GDP sebesar 2 persen. Hal ini juga diperjelas dalam buku yang ditulis oleh Samuelson dan Nordhaus, (2004), bahwa hukum okun menyatakan bahwa setiap penurunan dua persen GDP yang berhubungan dengan GDP potensial, angka pengangguran meningkat sekitar satu persen.

Pengukuran besarnya pertumbuhan ekonomi ini dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan. Makin tinggi pertumbuhan ekonomi makin baik kinerja pembangunan di wilayah tersebut. Secara umum, pada tahun 2014 perekonomian Kabupaten Subang mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,02 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, laju pertumbuhan ekonomi mengalami percepatan, dimana pada tahun 2013 tumbuh sebesar 4,57 persen sebagaimana grafik di bawah ini.



Sumber : BPS. Subang, 2015

Grafik 1. 4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Subang Tahun 2009-2014

Berdasarkan Latar Belakang diatas, penulis sangat tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Kabupaten Subang

yang akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Kabupaten Subang Tahun 1999-2014”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang, maka masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Bagaimana pengaruh pendidikan, jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Subang baik secara parsial maupun simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh pendidikan, jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Subang baik secara parsial maupun simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya yaitu:

1. Untuk Kepentingan Penulis

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh penulis selama dibangku perkuliahan dan menambah ilmu pengetahuan serta

pengalaman mengenai kajian ini guna mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja, melalui pengolahan data dan kunjungan langsung ke tempat yang dijadikan objek penelitian dalam penelitian ini. Selain itu kegunaan penelitian ini juga sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Pasundan Bandung.

2. Untuk Kepentingan Akademis

Dapat digunakan sebagai bahan informasi agar dapat digunakan untuk studi-studi selanjutnya dalam pengembangan ilmu ekonomi.

3. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Subang

Dapat dijadikan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan dan rencana pembangunan daerah di Kabupaten Subang dalam rangka pengentasan pengangguran.

